



JUNI 2026



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Juni 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Juni 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke, 07 Juli 2026

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si., MRSC
NIP: 999920240117145257



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Ringkasan Kelembagaan	1
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	1
1.2.2 Definisi	2
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	2
1.2.4 Tugas dan Fungsi	2
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN	6
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	6
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
3.3 . Penutup	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022.....	2
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan	5
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Hukum

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua



- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan



pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan



nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.

- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :



Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO. UNIT KERJA & JABATAN		JLH ORG
1.	Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
	: 1. POKJA Papua Sehat	2 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA) : 2. POKJA Papua Cerdas	2 org
	: 3. POKJA Papua Produktif	2 org
	: 4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan substantif : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan	6 org
4.	Staf/ Karyawan : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNNP	3 orang

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Kelompok kerja pada bulan Juni 2026 terurai sebagai berikut:

1. NOTULEN RAPAT BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama KABAIS RI

Pada : Senin, 7 - 8 Juni 2026



Beberapa topik pembahasan yang menjadi pembahasan pada Audiensi ini adalah:

- Pengembangan Jejaring Layanan Prioritas : Mengusulkan program pengampunan layanan medis prioritas untuk berbagai penyakit berat (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, KIA, Kesehatan Jiwa, dan mata) agar masyarakat tidak perlu di rujuk keluar daerah.
- Pembangunan SDM Kesehatan : Memohon dukungan pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan akses bagi putra-putri papua selatan agar menempuh Pendidikan spesialis dan mendapatkan praktik di rumah sakit pengampu.
- Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Melaksanakan Diskusi dengan Kabais tentang peran dan fungsi BPP dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi Evaluasi, Koordinasi pengawasan dan pembinaan.
- Pelaksanaan Audiensi Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan ini juga membahas terkait perlunya Kolaborasi antara Pokja (Sehat, Cerdas, Produktif, Polhukam) dengan OPD memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Fokus utamanya adalah menyatukan anggaran dan perencanaan agar Dana Otsus benar-benar berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar Orang

Asli Papua (OAP)—seperti akses kesehatan gratis di pedalaman, kepastian beasiswa, hilirisasi komoditas lokal, dan perlindungan hak adat.

- Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terkait sinergitas BPP dan Polhukam dalam meredam isu-isu strategis yang berkaitan dengan PSN.

**2. NOTULEN RAPAT Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan serta memperhatikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Pada, Selasa, 09 Juni 2026**



Pembahasandan Usulan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan adalah;

- Direktorat Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri Menjelaskan mengenai penguatan pelaksanaan kewenangan serta kelembagaan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus Papua yang merujuk pada **PP Nomor 106 Tahun 2021**.
- Menekankan pentingnya peran DPRK dalam mendukung implementasi kebijakan Otsus agar dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Menyampaikan krusialnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pihak BP3OKP dengan Pemerintah Daerah.
- Pembahasan dalam kegiatan tersebut memanda perlu Mendorong adanya sinkronisasi program kerja, harmonisasi kebijakan, evaluasi berkala, serta koordinasi intensif dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di tanah Papua
- Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga memandang perlu adanya Pembinaan yang humanis berorientasi pada pemberdayaan, yang diimbangi dengan pengawasan ketat tanpa toleransi terhadap penyimpangan, adalah kunci utama dalam menjaga marwah Otonomi Khusus Papua. Ini adalah manifestasi dari komitmen kita bersama untuk menghadirkan lompatan pembangunan Papua yang bersih, adil, dan berkelanjutan."
- Menegaskan kembali pentingnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

3. NOTULEN RAPAT Narasumber BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bpk. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, DPRP dan MRP

Pada Rabu 10 Juni 2026



Adapun Usulan dan Pendapat yang di sampaikan Direktur Jenderal Otonomin Daerah, dan Stakeholder dalam kegiatan tersebut adalah;

- Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan Pengakuan Kultural dan Historis Otsus merupakan wujud pengakuan negara terhadap keberagaman budaya, sejarah, dan aspirasi masyarakat khusus. Kebijakan ini diambil karena adanya kondisi sosio-historis khusus, dengan catatan tetap menjaga dan tanpa menghilangkan kedaulatan serta integritas NKRI.
- Integrasi Nasional Penerapan Otsus harus selalu sejalan dengan konstitusi dan sama sekali tidak mengancam kedaulatan Indonesia. Otsus berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencegah disintegrasi dengan cara memberikan ruang bagi daerah khusus untuk berpartisipasi penuh dalam sistem demokrasi dan pemerintahan NKRI.
- Keadilan Sosial dan Ekonomi Otsus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang selama ini kerap menjadi akar konflik dan ketidakstabilan di daerah. Langkah nyata yang dilakukan adalah melalui alokasi dana khusus yang ditargetkan untuk mengurangi ketertinggalan daerah tersebut.
- Desentralisasi dan Afirmasi Hak Ditegaskan bahwa Otsus bukanlah bentuk federalisme, melainkan sebuah konsep desentralisasi asimetris. Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah tertentu agar hak adat, politik, dan ekonomi dapat terpenuhi secara tepat sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat setempat.
- Kelembagaan Khusus Implementasi Otsus membawa konsekuensi logis berupa hadirnya lembaga khusus di pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk menjaga kekhususan/keistimewaan daerah tersebut (contoh yang disebutkan: MRP, Wali Nangroe, Wilayatul Hisbah, serta lembaga kekhususan lainnya).

- Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terkait pentingnya Kolaborasi bersama antar Lembaga, untuk mencapai Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dan Papua damai.

4. NOTULEN RAPAT Paripurna Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan Bersama Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan Pada, Sabtu 18 Juni 2026



Pembahasan yang di sampaikan pada kegiatan tersebut adalah :

- Pelaksanaan kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Papua Selatan melaporkan capaian hasil kinerja selama 1 tahun anggaran dan mengkaji dan menilai materi LKPJ antara lain capaian indikator kinerja makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, Angka kemiskinan dan upaya penanggulangannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat pengangguran terbuka (TPT).
 - Pemaparan realisasi APBD dalam laporan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: **Pendapatan Daerah:** Berfokus pada capaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. **Belanja Daerah:** Menyoroti tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran pada masing-masing OPD. **Pembiayaan Daerah:** Mengulas pengelolaan anggaran yang berkenaan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)."
- #### 5. NOTULENSI Kegiatan Kunjungan Kerja Bapak Wakil Presiden di Dampingi bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Pada ; Sabtu, 19 Juni 2026



Lokasi Kunjungan Kerja Bapak Wakil Presiden Bersama Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan, dan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Asmat.



- Kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden ke Kabupaten Asmat di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan untuk melihat dan memastikan kehidupan real dan layak tidaknya masyarakat di kabupaten Asmat.
- Kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, ke Museum Asmat untuk melihat langsung fasilitas keunikan ukiran dan peralatan perang Suku Asmat yang dilestarikan dengan baik, dan juga memiliki nilai komersial guna Mendorong optimalisasi Museum sebagai sarana Edukasi center dan transfer knowledge kepada generasi muda Asmat untuk tetap menjaga nilai-nilai Budaya yang diwariskan oleh nenek Moyang yang harus dilestarikan.
- Koleksi lain di Museum Asmat yang menjadi perhatian khusus dari Bapak Wapres dan Rombongan adalah Buaya besar yang di awetkan oleh Masyarakat Asmat karena Buaya ini banyak makan korban Masyarakat dan juga cara menangkap Buaya besar ini dengan Upacara pemanggilan Roh sehingga korban yang dimakan oleh Buaya ini diantarkan kepada Pawang Buaya yang selanjutnya dibunuh langsung oleh Pawang Buaya, dan Buaya ini menjadi center of Turis dari Eropa dan Asia.
- Kunjungan Kerja Bapak Wakil Presiden di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan untuk melihat Progress Pembangunan Gereja Katolik yang baru dibangun sebagai sarana Beribadah bagi Umat Katholik di Asmat oleh Bapak Wapres, dan yang menjadi konsen lain adalah untuk mendapatkan input-input dari Umat Katholik tentang Toleransi kehidupan beragama di Asmat.
- Pada saat Kunjungan kerja ke Gereja Katedral Asmat Bapak Wapres melihat langsung progres pekerjaan pembangunan gereja yang belum selesai sehingga Bapak Wakil Presiden tergugah hatinya untuk memberikan bantuan dana untuk Proses Finishing Pembangunan Gereja Katolik Asmat.
- Pada saat Kunjungan Bapak Wakil Presiden RI ke Pembangunan Gereja Katedral yang baru sempat menanyakan tentang Dapur MBG, serta minta tanggapan dari pihak Keuskupan Asmat apabila Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kelolah langsung oleh Keuskupan. Pada saat itu juga Bapak Uskup menyatakan sikap mendukung agar Dapur MBG dapat dikelola langsung oleh Keuskupan.

- Kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden ke Sekolah Pendidikan Sagu di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan di Kampung YPM untuk melihat bagaimana progres pembinaan dan Take Over Pendidikan Kepada Generasi Muda.
- Kunjungan Kerja Bapak Wakil Presiden di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan ke RS Perpetua Safanpo untuk memberikan Bantuan Peralatan medis, pemberian bantuan alat-alat medis kepada ibu-ibu yang melahirkan, dan alat Operasi Beda yang baru.
- Kunjungan Kerja Bapak Wakil Presiden di dampingi oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Ke RS Parpetua Safanpo untuk memastikan ketersediaan fasilitas rumah sakit dan juga untuk mendapatkan masukan dari ibu Direktur rumah sakit tentang kesiapan Rumah Sakit Perpetua untuk Mengupgrade RSUD Perpetua Safanpo dari Tipe D ke Type C akan direalisasikan tahun 2027.

**6. NOTULENSI Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan Bersama Bapak Kementerian Dalam Negeri, Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan
Pada, Senin, 22 Juni 2026**



Usulan dan Penegasan yang di sampaikan dalam kegiatan tersebut ;

- Kegiatan tersebut memiliki makna strategis Penghargaan ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan ruang pembelajaran bersama untuk menampilkan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pembangunan.
- Indikator Keberhasilan: Penilaian difokuskan pada aspek yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, yaitu: Pengendalian inflasi, Penurunan angka pengangguran, Inovasi pembiayaan pembangunan (*creative financing*) Penanggulangan kemiskinan, Penurunan angka *stunting*.

- Bapak Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan putaran pertama yang ke-6, bertujuan untuk memotivasi para kepala daerah dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat demi kemajuan daerah.
- Kemendagri mengumumkan pemberian bantuan insentif bagi pemda berprestasi dengan rincian, Peringkat I: Rp3 Miliar, Peringkat II: Rp2 Miliar, Peringkat III: Rp1 Miliar. Insentif ini wajib dipergunakan untuk memperkuat program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.
- Apresiasi Partisipasi Kinerja Regional Provinsi Papua Selatan menerima apresiasi atas komitmen dan partisipasinya dalam memperkuat penyelarasan indikator makro pelayanan publik di wilayah Otonomi Baru (DOB), serta menjadikan forum evaluasi ini sebagai basis data dan tolok ukur (*benchmark*) strategis untuk memacu percepatan penurunan angka *stunting*, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi daerah untuk masa depan.

7. Notulensi Pengukuhan Pokja Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Bersama Papua Lainnya

Pada, Senin 22 Juni 2026



Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026 menghasilkan berbagai pemahaman, komitmen, dan kesepakatan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Pokja selama Tahun 2026. Adapun hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Kelompok Kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Badan Pengarah Papua sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 serta berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pemahaman ini menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
2. Peserta memperoleh pembekalan mengenai arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kelompok kerja.
3. Terbangun kesamaan persepsi antaranggota Pokja mengenai pentingnya pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagai instrumen utama dalam mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua di tingkat provinsi maupun kabupaten.



8. Notulensi Kegiatan Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Bersama dengan Ibu Wakil Menteri BKKBN RI, Bapak Bupti Merauke



Usulan yang di sampaikan dalam kegiatan tersebut,

- Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ke Kabupaten Merauke merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional bersama Bapak Bupati dan Bapak Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan.
- Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ibu Ratu Ayu Isyana mengedukasi masyarakat Terkait stunting dalam pencegahannya membutuhkan kolaborasi dari berbagai Elemen masyarakat, BUMN, BUMD, dunia usaha, Akademisi dan Komunitas.
- Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) menyampaikan memastikan keterlibatan keluarga atau peran ayah dalam proses tumbuh kembang anak-anak yang sehat.
- Kunjungan Kerja Wakil Menteri BKKBN juga berkolaborasi bersama Pemerintah daerah dalam Memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen kependudukan. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, serta pendampingan calon pengantin



- Pemerintah Kabupaten Merauke berhasil melaksanakan pencatatan sipil massal bagi 197 pasangan (394 jiwa) yang berasal dari berbagai denominasi agama. Para peserta menerima Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga baru, KTP elektronik dengan status kawin, serta paket keluarga.
- Kunjungan Kerja wakil Menteri BKKBN bersama Bapak Bupati Kabupaten Merauke, dan Bapak kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan berkesmpatan melaksanakan kunjungan ke rumah warga dengan memberikan bantuan pembagunan jamban, Pemberian bantuan pangan dan juga melaksanakan peletakan batu pertama untuk jamban.

LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA CERDAS JUNI TAHUN 2026

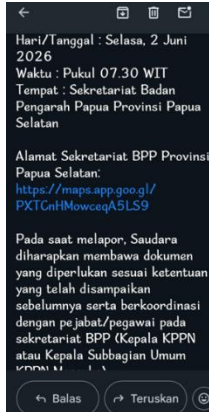
A. Pelaksanaan Kegiatan

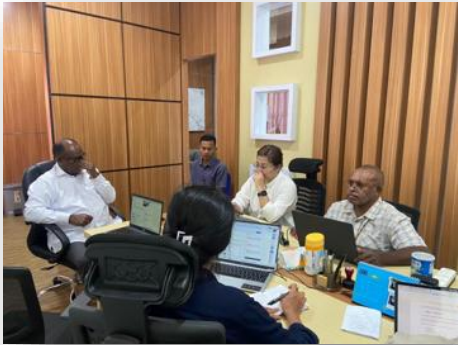
Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada **Juni tahun 2026**, dengan rincian kegiatan yang terurai pada **Error! Reference source not found.** berikut. Dengan Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 2 tahun 2026

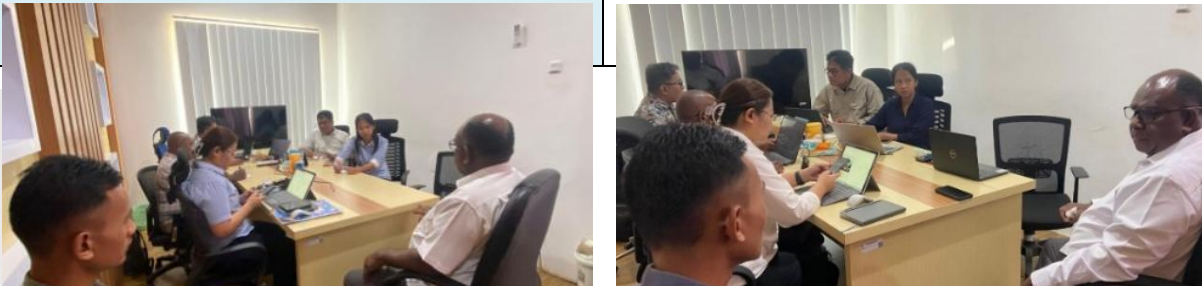
Bulan Juni 2026

Kegiatan 1		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Selasa, 02 Juni 2026	
		Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
		☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
		☒	Surat Tugas/Sumber Email: Sekretariat BPP Papua
		☐	Insidentil : Sebutkan Alasannya
		Surat Tugas	
		Surat Tugas Nomor . . . Tanggal	
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BPP	
Judul Kegiatan	:	Pemberitahuan Kelulusan seleksi dan Mulai Bekerja Sebagai Anggota Pokja di Sekretariat Badan Pengarah	
Misi/Keterangan	:	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN/POKJA PAPUA CERDAS	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua	
Pelaksana Kegiatan	:	BPP-PPS dan Anggota Pokja	
Peserta Kegiatan/ Sumber Dokumen	:	Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif Pokja Papua Cerdas : Jaswadi, S.Pd., M.MPd.	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Perkenalan Melapor dan berkoordinasi bersama Anggota BPP PPS dan Pokja Aktif BPP PPS	
Hasil/output Kegiatan	:	Adaptasi lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi Pokja Papua Cerdas	



Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Arahan, Petunjuk dan Koordinasi dari Anggota BPP dan Anggota Pokja BPP PPS
Dokumentasi		

Kegiatan 2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Rabu, 03 Juni 2026 Pukul : 10.00-12.00 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan
	☒ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
	☐ Undangan :
	☒ Insidentil Internal: Rapat Koordinasi Bersama Anggota BPP dan Pokja
	Surat Tugas Nomor Tanggal
	Lokasi Kegiatan :
	Ruang Kerja Anggota Pokja BPP PPS

Judul Kegiatan	:	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota Pokja Baru Tahun 2026
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK penguatan pelaksanaan tugas, fungsi dan Peran Anggota BPP, Anggota Pokja BPP PPS
Pelaksana Kegiatan	:	BPP PPS
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Staf
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kolaborasi SHEK penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota BPP dan Anggota POKJA
Hasil/output Kegiatan	:	
	1.	Bagi POKJA Baru mendapat petunjuk dan arahan terkait dengan Regulasi dan Pedoman Kerja, serta dokumen-dokumen kerja yang sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Pokja.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Rekomendasi
	1.	Berkolaborasi dan membangun bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan peran dari masing-masing Pokja BPP PPS
Dokumentasi		



Kegiatan 3		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Kamis, 04 Juni 2026 Pukul : 09.00-12.00 WIT	
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan		
	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
	☒	Undangan LP2M UNMUS	
	☐	Insidentil : Sebutkan Alasannya	
	Surat Tugas Nomor :		
	Tanggal		
Lokasi Kegiatan :		Hotel Halogen	
Judul Kegiatan	:	Mengikuti Sosialisasi Grant Riset BPPD bertempat di Ballroom Hotel Halogen Merauke	
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Papua Produktif	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK penguatan jejaring kolaborasi penelitian dan pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi	
Pelaksana Kegiatan	:	LP2M UNMUS	
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Tim BPPD, Dosen Perguruan Tinggi Se Papua Selatan	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kolaborasi SHEK penguatan jejaring kolaborasi penelitian dan pengembangan inovasi antara lembaga riset dan perguruan tinggi.	
Hasil/output Kegiatan	:		
	1.	Memperoleh informasi mengenai skema pendanaan riset, peluang kolaborasi penelitian, dan penguatan kapasitas SDM Papua melalui program Grant Riset BPPD.	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Rekomendasi	
	1.	Berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan penelitian dan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, akademisi, industri dan praktisi dalam mensukseskan program grant riset	



Dokumentasi	
-------------	--

Kegiatan 4	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Senin, 08 Juni 2026 Pukul : 09.00 WIT	
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
	☒	Undangan/Surat : Badan Pengurus Mata Garuda Papua Selatan
	☐	Insidentil :
	Surat Tugas Nomor Tanggal	
	Lokasi Kegiatan :	
	Ruang Kerja Anggota Pokja BPP PPS	
Judul Kegiatan	:	Menjadi Juri Eksternal Alumni Inspiratif Mata Garuda Papua Selatan LPDP Tahun 2026
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Penilaian Alumni Inspiratif Mata Garuda Papua Selatan LPDP Tahun 2026
Pelaksana Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas BPP PPS dan Badan Pengurus Mata Garuda Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, Peserta Finalis Alumni LPDP PPS dan Badan Pengurus Mata Garuda Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memberikan penilaian terhadap kualifikasi dan kualitas Alumni LPDP sebagai inspirasi peningkatan kualitas pendidikan SDM Papua Selatan.
Hasil/output Kegiatan	:	
	Matriks Penilaian Juri Eksternal pada peserta seleksi Alumni Inspiratif	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	
	Dengan terpilihnya 3 Finalis sebagai Juara, diharapkan mampu menjadi pioner-pioner pengalaman prestasi anak didik	



		hususnya Orang Asli Papua dalam meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi Dalam dan Luar Negeri.
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	:	Ir. Frederik H.Sumbung,ST.,M.Eng
Dokumentasi/Link Dokumen	:	

Kegiatan 5		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Selasa-Rabu, 09-10 Juni 2026 Pukul : 09.00-12.00 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
	☒	Undangan : Direktur Jenderal OTDA No. 100.2.7/1711/OTDA Tgl 22 Mei 2026
	☐	Insidental : Sebutkan Alasannya
	Surat Tugas Nomor Tanggal	
Lokasi Kegiatan :		Ruang Rapat Gubernur Lt. 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan , Salor, Distrik Kurik, Kab. Merauke
Judul Kegiatan	:	Narasumber Rapat koordinasi bersama Kementerian/ Lembaga terkait yang berfokus pada; a) Pemanfaatan Anggaran yang akuntabel, terdiri atas Dana Otsus, DBH Migas, dan DTI, b) Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025- 2029 (RAPPP),c) Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 33 Tahun 2024, d) Pelaksanaan Kewenangan dan Kelembagaan Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, e) Penguatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pengarah Papua (BP3OKP/BPP), serta f) pengawasan tata kelola implementasi dana otonomi khusus
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Narasumber Materi a) Pemanfaatan Anggaran yang akuntabel, terdiri atas Dana Otsus, DBH Migas, dan DTI, b) Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025- 2029 (RAPPP),c) Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 33 Tahun 2024, d) Pelaksanaan Kewenangan dan Kelembagaan Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, e) Penguatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pengarah Papua (BP3OKP/BPP), serta f) pengawasan tata kelola implementasi dana otonomi khusus
Pelaksana Kegiatan	:	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRK 4 Kabupaten Se Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK mekanisme pengangkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus Papua khususnya



		terhadap pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.
Hasil/output Kegiatan	:	
	1.	Penyampaian materi tentang penguatan kapasitas dan kinerja DPRK terkait dengan UU dan Peraturan pelaksanaan OTSUS Papua.
	2.	Sinkronisasi pemahaman bersama DPRK dan Pemerintah tentang tugas, fungsi dan peran BP3OKP/BPP dalam pelaksanaan OTSUS Papua.
	3.	Keselaran pemahaman tentang proses dan mekanisme tata kelola OTSUS.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Rekomendasi
	1.	Berkolaborasi dan bersinergi bersama DPRK, Pemerintah dan kementerian terkait dalam pelaksanaan OTSUS Papua
	2.	Melakukan penguatan dan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan OTSUS Papua
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	:	1. Ir. Frederik H.Sumbung,ST.,M.Eng 2. Jaswadi, S.Pd., M.MPd.
Dokumentasi :		
		
		



--	--

Kegiatan 6		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Kamis, 11 Juni 2026 Pukul : 09.00 WIT	
		Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
		☒ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
		☐ Undangan :	
		☒ Insidental : Pembuatan Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STK Santo Yakobus Merauke	
		Surat Tugas Nomor Tanggal	
		Lokasi Kegiatan :	
		Ruang Kerja Anggota Pokja BPP PPS	
Judul Kegiatan	:	Pembuatan Rekomendasi	
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP PPS	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Kolaborasi percepatan pendidikan	
Pelaksana Kegiatan	:	BPP PPS dan STK Santo Yakobus Merauke	
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas.	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Dukungan administratif terhadap percepatan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi	
Hasil/output Kegiatan	:	Surat Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STK Santo Yakobus Merauke	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Koordinasi lanjutan pada kementerian terkait oleh Anggota BPP untuk memantau tindak lanjut rekomendasi.	
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	:	Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M. Eng	
Dokumentasi/Link Dokumen			



Kegiatan 7	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Jumat, 19 Juni 2026 Pukul : 09.00-12.00 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan ☒ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☐ Undangan : ☐ Insidental : Sebutkan Alasannya Surat Tugas Nomor Tanggal Lokasi Kegiatan : Sekolah Rakyat terintegrasi 77 Kabupaten Merauke – Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	: Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Misi/Keterangan	: Anggota BPP, dan Anggota Pokja BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Operasional Sekolah Rakyat Kabupaten Merauke
Pelaksana Kegiatan	: BPP PPS
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Koordinasi dan Konsolidasi tentang Aktifitas operasional sekolah rakyat.
Hasil/output Kegiatan	1 Peserta Didik 100% Orang Asli Papua yang berasal dari Kota Merauke dan Perkampungan di wilayah Kabupaten Merauke 2 Gedung Sekolah Saat ini merupakan Gedung Pinjam Pakai dari SMK N. 2 Merauke 3 Belum tersedianya lahan yang pasti yang berdampak pada tidak dapat mendirikan bangunan Sekolah Rakyat, dan juga sudah tidak dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2026. 4 Jenjang Pendidikan yang berlangsung pada sekolah rakyat Kab. Merauke yang tersedia baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena keterbatasan Gedung dan Tenaga Pengajar. 5 Tenaga pengajar yang ada merupakan tenaga pengajar yang terekrut dari luar Kab. Merauke dan bahkan dari luar Provinsi Papua Selatan 6 Terbatasnya sarana transportasi yang tersedia pada sekolah rakyat, berdampak pada penyerapan siswa dari daerah-daerah terisolir.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi 1. Anggota BPP perlu melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kab. Merauke, terkait ketersediaan lahan, pemenuhan sarana transportasi sebagai angkutan siswa dari kampu-kampung. 2. Anggota BPP perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemerintah Kab. Merauke, Kementerian terkait dalam penyediaan tenaga guru pada semua jenjang yang ada dan yang akan harus ada pada sekolah rakyat terintegrasi 77
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	: 1. Ir. Frederik H.Sumbung,ST.,M.Eng 2. Jaswadi, S.Pd., M.MPd.
Dokumentasi	



Kegiatan 8		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Senin-Rabu, 22-24 Juni 2026 Pukul : WIT	
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan		
	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
	☒	Undangan : UND-14/SETBPP/JYP/ 2026 Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura	
	☐	Insidentil : Sebutkan Alasannya	
	Surat Tugas Nomor ST-64/SETBPP/JYP/2026 Tanggal 19 Juni 2026		
	Lokasi Kegiatan : Gedung Keuangan Negara LT.8 Jayapura		
Judul Kegiatan	:	Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026	
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP, dan Anggota Pokja BPP PPS	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026	
Pelaksana Kegiatan	:	Badan Pengarah Papua Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura	
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif Rekrutmen Tahun 2026 BPP PPS	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pengukuhan dan Pembekalan	
Hasil/output Kegiatan	:		
	1.	Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi Pokja Badan Pengarah Papua.	
	2.	Terbangunnya kesamaan persepsi antara Anggota BPP, Sekretariat BPP dan Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.	
	3.	Meningkatnya pemahaman peserta mengenai arah kebijakan RIPP dan RAPP sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan Papua.	
	4.	Peserta memperoleh pemahaman mengenai tata kelola Dana Otonomi Khusus yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	
	5.	Terbangunnya komitmen kerja melalui penandatanganan Pakta Integritas.	
	6.	Terjalannya koordinasi dan komunikasi antar Pokja dari seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Rekomendasi	
	1.	Pelaksanaan Tugas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku	
	2.	Berkolaborasi dan bekerjasama dengan Pemerintah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua, khususnya Papua Selatan	
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	:	1. Jaswadi, S.Pd., M.MPd.	



Dokumentasi	:	
---	----------	--

Kegiatan 9		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Kamis, 25 Juni 2026 Pukul : 14.00 – 17.30 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
	☐	Undangan :
	☒	Insidentil : Menerima kunjungan Kerja Pengurus Yayasan RITA Merauke Papua Selatan
	Surat Tugas Nomor Tanggal	
Judul Kegiatan		Lokasi Kegiatan :
		Ruang Kerja Anggota BPP PPS
	:	Kunjungan Kerja Koordinasi Pengurus Yayasan RITA Merauke
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP, dan Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Terampil Orang Asli Papua (OAP)
Pelaksana Kegiatan	:	Yayasan RITA Merauke Papua Selatan dan BPP PPS
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Yayasan RITA tentang Pengarah konsolidasi jejaring peningkatan kompetensi SDM OAP Terampil.
Hasil/output Kegiatan		:
		1. Banyaknya Sumber Daya Manuasia (SDM) OAP yang membutuhkan peningkatan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan Pasar, namun ketersediaan lembaga diklat di Provinsi Papua Selatan sangat terbatas.
		2. Ketersediaan anggaran dari pihak pemerintah masih sebatas pada Dinas Pendidikan Provinsi yang dapat di akses oleh Yayasan
		3. Keterlibatan Dunia Industri dalam pengembangan kompetensi SDM belum maksimal, dan Yayasan belum melakukan koordinasi untuk hal tersebut.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut		:
		Rekomendasi
		1. Perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPP PPS bersama pemerintah untuk memperoleh rekomendasi Lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk peningkatan keterampilan SDM OAP.
		2. Koordinasi bersama antara BPP PPS, PTSP, Disnaker, dan Industri se Papua Selatan terkait CSR Industri.
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan		1. Ir. Frederik H. Sumbung, ST.,M.Eng

	2. Jaswadi, S.Pd., M.MPd.
Dokumentasi	

Kegiatan 10	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Senin-Selasa, 01-30 Juni 2026 Pukul : Hari Kerja Efektif (Senin-Jumat)
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan ☒ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 Review Laporan Tahunan Provinsi Papua Selatan (PPS) dan 4 Kabupaten PPS ☐ Undangan : ☐ Insidentil : Surat Tugas Nomor Tanggal Lokasi Kegiatan : Ruang Kerja Anggota BPP PPS
Judul Kegiatan	: Review Laporan Tahunan Tahun 2025
Misi/Keterangan	: Anggota BPP, dan Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program OTSUS
Pelaksana Kegiatan	: Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Mereview pemenuhan pelaporan realisasi OTSUS Papua Selatan tahun 2025
Hasil/output Kegiatan	: 1. Tersusun catatan hasil telaahan, identifikasi capaian, permasalahan, dan isu strategis khususnya bidang Papua Cerdas pada Penggunaan Anggaran Belanja Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Prov Papua Selatan, Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat dan Kab. Boven Digoel 2. Tersusun catatan hasil telaahan, identifikasi capaian, permasalahan, dan isu strategis khususnya bidang Papua Cerdas pada Penggunaan Anggaran Belanja Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Prov. Papua Selatan, Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat dan Kab. Boven Digoel 3. Tersusun catatan hasil telaahan, identifikasi capaian, permasalahan, dan isu strategis khususnya bidang Papua Cerdas pada Penggunaan Anggaran Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Prov. Papua Selatan, Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat dan Kab. Boven Digoel
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: Rekomendasi 1. Perlu adanya koordinasi pengarah Anggota BPP terhadap peningkatan kualitas SDM Pengelola Dana Otsus



	2. Perlu adanya pengarahan terkait pemanfaatan anggaran secara maksimal khususnya dalam penetapan spesifikasi dan jumlah penerima manfaat sesuai dengan program yang direncanakan
Peserta Kegiatan dan Penyusun Laporan	1. Ir. Frederik H. Sumbung, ST.,M.Eng 2. Jaswadi, S.Pd., M.MPd.
Dokumentasi	

LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT JUNI TAHUN 2026

KEGIATAN I	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026 Waktu: Pukul 08.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	: Halogen Hotel Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	: RAPAT PENGUATAN KAPASITAS DAN KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN SERTA PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA SELATAN
Misi / Keterangan	: BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA SEHAT Papua Sehat: Kegiatan ini secara langsung mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan sistem jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, penguatan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat Papua Selatan. Papua Cerdas: Mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami regulasi Otonomi Khusus, penguatan sistem perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi. Papua Produktif: Mendukung penguatan tata kelola pembangunan yang akuntabel sehingga pemanfaatan Dana Otonomi Khusus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi daerah, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi Orang Asli Papua.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	: SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Bidang Kesehatan Sinkronisasi: Pokja Papua Sehat melaksanakan sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan agar selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, PP Nomor 106 Tahun 2021, PP Nomor 107 Tahun 2021, RIPPP, RAPPP, serta PMK Nomor 33 Tahun 2024. Sinkronisasi juga diarahkan untuk memastikan program kesehatan daerah mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta perlindungan kesehatan bagi Orang Asli Papua. Harmonisasi: Pokja Papua Sehat melaksanakan harmonisasi kebijakan dan program lintas sektor kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,



KEGIATAN I

		Pemerintah Kabupaten, BPK,BPKP,KPK, DPR Papua Selatan, MRP, serta perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan kesehatan berjalan secara terpadu, saling mendukung, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Evaluasi: Pokja Papua Sehat melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengawasan, pencapaian indikator pelayanan dasar kesehatan, serta berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan wilayah dengan akses geografis yang sulit. Koordinasi: Pokja Papua Sehat melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BPK,BPKP,KPK, BPJS Kesehatan, DPR Papua Selatan, MRP, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta mendorong penyelesaian berbagai permasalahan strategis yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.
Pelaksana Kegiatan	:	Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri; 2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 5. Anggota Badan Pengarah Papua (BP3OKP); 6. Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; 7. Pemerintah Provinsi Papua Selatan; 8. Pemerintah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel; 9. DPR Papua Selatan; 10. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan; 11. Instansi vertikal dan mitra pembangunan lainnya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 2. Memperkuat implementasi kewenangan dan kelembagaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 dan PMK Nomor 33 Tahun 2024. 4. Memperkuat sinkronisasi pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029. 5. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BP3OKP, DPR Papua Selatan, MRP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua Selatan. 6. Mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi Otonomi Khusus, khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat Orang Asli



KEGIATAN I

		Papua sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.
Hasil / Output Kegiatan	:	Pelaksanaan Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus Papua menghasilkan berbagai kesepahaman strategis mengenai penguatan tata kelola Otonomi Khusus, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Beberapa hasil penting yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Pemerintah Pusat menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan upaya memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua melalui peningkatan kewenangan daerah, penguatan kelembagaan, penyempurnaan tata kelola keuangan, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Pelaksanaan Otonomi Khusus diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Penguatan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis kinerja. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi program sehingga pemanfaatan Dana Otonomi Khusus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. Selain itu, disampaikan pula berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti keterlambatan pemenuhan syarat penyaluran, tingginya sisa dana (SILPA), serta perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis capaian output dan outcome. 3. Penguatan Fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BP3OKP menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagai instrumen untuk mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus. Melalui fungsi tersebut diharapkan seluruh program pembangunan yang didanai Dana Otonomi Khusus dapat selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta kebutuhan riil masyarakat di Provinsi Papua Selatan. 4. Penguatan Regulasi Daerah Dalam pembahasan juga disampaikan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Otonomi Khusus di Papua Selatan. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, perlindungan Orang Asli Papua, serta penyelenggaraan pelayanan dasar. 5. Permasalahan Kepesertaan BPJS Kesehatan Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam forum adalah tingginya jumlah peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan



KEGIATAN I

Kesehatan (PBI JK) yang berstatus nonaktif, yaitu sekitar 89.000 jiwa di Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan Orang Asli Papua. Dalam forum disampaikan bahwa apabila seluruh kepesertaan tersebut harus diaktifkan kembali oleh pemerintah daerah, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Oleh karena itu diperlukan validasi data kepesertaan secara by name by address agar pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan sasaran, khususnya bagi Orang Asli Papua yang berhak memperoleh jaminan kesehatan.

6. Dampak terhadap Pembiayaan Kesehatan Daerah

Forum juga membahas bahwa tingginya kebutuhan anggaran untuk mengaktifkan kembali peserta PBI berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam memanfaatkan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan. Apabila sebagian besar anggaran dialihkan untuk membayar iuran jaminan kesehatan, maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas lainnya, seperti peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengadaan alat kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan dapat menjadi terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar pemanfaatan Dana Otonomi Khusus tetap mampu mendukung pembangunan kesehatan secara optimal.

7. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang Belum Dijamin BPJS

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa masih terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, antara lain pelayanan bagi korban konflik sosial, korban kekerasan, maupun kondisi tertentu yang memerlukan pembiayaan komplementer. Akibatnya, pemerintah daerah tetap harus mengalokasikan anggaran tambahan di luar skema BPJS Kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah karena berpotensi menimbulkan beban pembiayaan ganda apabila tidak didukung dengan kebijakan pembiayaan yang lebih adaptif.

8. Tantangan Geografis dalam Pelayanan Kesehatan

Peserta rapat juga menyoroti bahwa karakteristik geografis Papua Selatan memerlukan pendekatan pembiayaan kesehatan yang berbeda dengan daerah lain. Penentuan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan dinilai tidak cukup hanya mempertimbangkan jarak antarwilayah, tetapi juga harus memperhitungkan waktu tempuh, kondisi transportasi sungai dan laut, keterbatasan akses darat, serta tingginya biaya bahan bakar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak dan sistem rujukan pasien. Kondisi geografis tersebut menyebabkan biaya operasional pelayanan kesehatan di Papua Selatan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pendanaan kesehatan.

9. Pentingnya Integrasi Data Orang Asli Papua

Forum juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan afirmatif, termasuk dalam pengelolaan kepesertaan jaminan kesehatan, perencanaan pembangunan, penyaluran Dana Otonomi Khusus, serta penyusunan program pelayanan dasar yang tepat sasaran.



KEGIATAN I

Integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Selatan.

10. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Sebagai hasil akhir pembahasan, seluruh peserta sepakat bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus, tetapi juga ditentukan oleh kualitas koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BP3OKP, DPR Papua Selatan, MRP, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Selatan, khususnya Orang Asli Papua.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan selama pelaksanaan Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus Papua, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan memandang perlu adanya tindak lanjut yang terarah untuk memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus, khususnya pada sektor kesehatan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BP3OKP, BPKP, BPK, KPK, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus di bidang kesehatan.
2. Melakukan validasi dan pemutakhiran data kepesertaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara by name by address, sehingga pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat untuk memastikan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang berhak, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
3. Mendorong penyelesaian permasalahan sekitar 89.000 peserta PBI Jaminan Kesehatan yang berstatus nonaktif melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan kementerian terkait, sehingga masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan tanpa membebani kapasitas fiskal daerah secara berlebihan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan agar tetap difokuskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, pengendalian penyakit prioritas, penurunan stunting, serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
5. Mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan karakteristik geografis Papua Selatan dalam penyusunan kebijakan pendanaan kesehatan, dengan mempertimbangkan waktu tempuh, akses transportasi, serta tingginya biaya operasional pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan.
6. Mendorong penyempurnaan kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi kasus-kasus yang belum sepenuhnya dijamin oleh BPJS Kesehatan, sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian dalam penyediaan pembiayaan komplementer tanpa menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
7. Memperkuat pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) oleh BP3OKP dalam mengawal implementasi program pembangunan kesehatan yang didanai Dana Otonomi Khusus



KEGIATAN I

agar selaras dengan RIPPP, RAPPP, RPJMD, serta kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan tersebut, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, BPJS Kesehatan, Bapperida, Dukcapil, Dinas sosial dan perangkat daerah lainnya mengenai permasalahan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan serta implikasinya terhadap pembiayaan kesehatan daerah.
2. Melaksanakan sinkronisasi data dan informasi mengenai kepesertaan jaminan kesehatan, data Orang Asli Papua, serta kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
3. Mengawal implementasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan melalui pelaksanaan fungsi SHEK, sehingga alokasi anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Selatan.
4. Menyampaikan hasil rapat dan rekomendasi kepada Anggota Badan Pengarah Papua, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan penganggaran tahun berikutnya.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil rapat, khususnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan, optimalisasi Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

Kesimpulan dan Saran

: Kesimpulan

Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus Papua memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan, kelembagaan, dan tata kelola Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Selatan. Selain membahas aspek regulasi dan pengelolaan keuangan daerah, forum ini juga mengidentifikasi berbagai isu strategis di sektor kesehatan yang memerlukan perhatian bersama.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah tingginya jumlah peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berstatus nonaktif, keterbatasan akses pemerintah daerah terhadap data kepesertaan yang akurat, serta potensi meningkatnya beban pembiayaan kesehatan daerah apabila pemerintah harus menanggung seluruh biaya pengaktifan kembali kepesertaan tersebut. Di samping itu, forum juga menyoroti masih adanya pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya dijamin oleh BPJS Kesehatan serta tingginya biaya operasional pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis Papua Selatan yang luas dan sulit dijangkau.

Melalui kegiatan ini diperoleh berbagai masukan strategis mengenai perlunya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, integrasi data Orang Asli Papua, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Bagi Pokja Papua Sehat BP3OKP, hasil kegiatan ini menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk mengawal pelaksanaan

KEGIATAN I

kebijakan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat Papua Selatan, khususnya Orang Asli Papua.

Saran

1. Pemerintah Pusat bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial perlu mempercepat validasi serta penyelesaian permasalahan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan agar masyarakat yang berhak, khususnya Orang Asli Papua, tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
2. Pemerintah Daerah perlu memperkuat integrasi data kependudukan, data Orang Asli Papua, dan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
3. Kebijakan pendanaan kesehatan di wilayah Papua perlu mempertimbangkan kondisi geografis, aksesibilitas, waktu tempuh, serta tingginya biaya operasional pelayanan kesehatan agar alokasi anggaran lebih proporsional dengan kebutuhan riil di lapangan.
4. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan perlu terus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, pengendalian penyakit menular, penurunan stunting, dan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
5. Pokja Papua Sehat BP3OKP diharapkan terus memperkuat pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagai bagian dari upaya mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus, sehingga setiap program pembangunan kesehatan yang didanai Dana Otonomi Khusus dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan.

Dokumentasi

:



Kegiatan II. PENGUKUHAN DAN PEMBEKALAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA BADAN PENGARAH PAPUA TAHUN 2026

Tabel 2.2 Rincian Kegiatan II Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Juni 2026

KEGIATAN 2	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tanggal: Senin–Rabu, 22–24 Juni 2026 Waktu: Pukul 09.00–21.00 WIT
Lokasi Kegiatan	Hotel Swiss-Belhotel Jayapura dan Gedung Keuangan Negara Lantai 8 Jayapura
Judul Kegiatan	PENGUKUHAN DAN PEMBEKALAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA BADAN PENGARAH PAPUA TAHUN 2026



KEGIATAN 2

Misi / Keterangan	:	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA SEHAT Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan kapasitas anggota Pokja dalam mengawal kebijakan pembangunan kesehatan, meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan fungsi SHEK berjalan secara optimal untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua. Papua Cerdas: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pokja melalui pembekalan mengenai kebijakan Otonomi Khusus, tata kelola pemerintahan, penyusunan rencana kerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi program. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas sehingga pelaksanaan program percepatan pembangunan dapat memberikan hasil yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Bidang Kesehatan Sinkronisasi: Pokja Papua Sehat melakukan sinkronisasi pemahaman anggota baru terhadap kebijakan nasional, RIPPP, RAPPP, serta berbagai regulasi Otonomi Khusus sebagai dasar penyusunan program kerja Pokja yang selaras dengan prioritas pembangunan Papua Selatan. Harmonisasi: Melakukan harmonisasi persepsi antaranggota Pokja, Sekretariat Badan Pengarah Papua, serta Anggota Badan Pengarah Papua mengenai mekanisme kerja, pembagian tugas, dan pola koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus. Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap kesiapan anggota Pokja dalam memahami tugas dan tanggung jawab, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif. Koordinasi: Membangun koordinasi awal antaranggota Pokja dari seluruh Daerah Otonom Baru (DOB), Sekretariat Badan Pengarah Papua, serta kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan program kerja lintas sektor yang terintegrasi.
Pelaksana Kegiatan	:	Sekretariat BPP
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	1. Anggota Badan Pengarah Papua; 2. Sekretariat Badan Pengarah Papua; 3. Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua hasil rekrutmen Tahun 2026 yang terdiri atas Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Papua Produktif; 4. Narasumber dari kementerian/lembaga terkait; 5. Tim Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); 6. Tenaga ahli dan fasilitator kegiatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mengukuhkan anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 2. Meningkatkan pemahaman anggota Pokja mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Badan Pengarah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEGIATAN 2

		3. Memberikan pembekalan mengenai arah kebijakan RIPPP dan RAPPP sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pokja. 4. Meningkatkan kapasitas anggota Pokja dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). 5. Menumbuhkan komitmen, integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi antaranggota Pokja melalui penandatanganan Pakta Integritas. 6. Membangun koordinasi awal antaranggota Pokja dari seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua sebagai dasar pelaksanaan program kerja yang terintegrasi.
Hasil / Output Kegiatan	:	Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026 menghasilkan berbagai pemahaman, komitmen, dan kesepakatan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Pokja selama Tahun 2026. Adapun hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Anggota Kelompok Kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Badan Pengarah Papua sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 serta berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pemahaman ini menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Peserta memperoleh pembekalan mengenai arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kelompok kerja. 2. Terbangun kesamaan persepsi antaranggota Pokja mengenai pentingnya pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagai instrumen utama dalam mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua di tingkat provinsi maupun kabupaten. 3. Seluruh anggota Pokja melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). 4. Terjalin koordinasi dan komunikasi awal yang lebih baik antaranggota Pokja dari seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Forum ini menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman, membangun jejaring kerja, serta memperkuat kolaborasi lintas Pokja. 5. Bagi Pokja Papua Sehat, kegiatan pembekalan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah pembangunan sektor kesehatan dalam RIPPP dan RAPPP, sehingga menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja yang mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan dasar, penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua. 6. Forum juga menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja tahunan, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan bulanan dan triwulanan sebagai instrumen pengukuran capaian pelaksanaan tugas Pokja. 7. Dalam sesi diskusi berkembang pemahaman bahwa keberhasilan percepatan pembangunan Papua memerlukan sinergi yang kuat antara Badan Pengarah



KEGIATAN 2

	Papua, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, serta seluruh pemangku kepentingan. 8. Peserta juga mengidentifikasi perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pokja secara berkelanjutan melalui kegiatan pembekalan teknis, pelatihan, pendampingan, dan berbagi praktik baik agar anggota mampu melaksanakan fungsi SHEK secara optimal. 9. Kegiatan pengukuhan dan pembekalan menjadi titik awal terbentuknya komitmen bersama seluruh anggota Pokja untuk bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan bertanggung jawab dalam mendukung percepatan pembangunan Papua melalui pelaksanaan tugas yang terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi 1. Memperkuat koordinasi antara Anggota Badan Pengarah Papua, Sekretariat Badan Pengarah Papua, dan seluruh Kelompok Kerja dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). 2. Menyusun rencana kerja Pokja Papua Sehat yang selaras dengan RIPPP, RAPPP, RPJMD Provinsi Papua Selatan, serta isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. 3. Melaksanakan pelaporan kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Pokja serta bahan evaluasi kinerja. 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten, BPJS Kesehatan, rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan program Papua Sehat. 5. Meningkatkan kapasitas anggota Pokja melalui pelatihan, workshop, pembekalan teknis, dan forum koordinasi agar mampu mengikuti perkembangan regulasi serta kebijakan Otonomi Khusus Papua. 6. Mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan kesehatan yang terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. 7. Ketersediaan Anggaran yang cukup untuk menunjang tugas dan fungsi anggota pokja Rencana Tindak Lanjut 1. Menyusun rencana kerja Pokja Papua Sehat Tahun 2026 beserta indikator kinerja yang terukur. 2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan mitra pembangunan terkait pelaksanaan program prioritas Papua Sehat. 3. Menyusun mekanisme pelaporan dan dokumentasi kegiatan Pokja secara berkala sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi. 4. Melaksanakan forum koordinasi internal Pokja secara rutin untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan menyusun rekomendasi kepada Anggota Badan Pengarah Papua. 5. Mengidentifikasi kebutuhan data, informasi, dan kebijakan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK pada sektor kesehatan.

KEGIATAN 2

Kesimpulan dan Saran	:	Kesimpulan Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026 merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun kapasitas kelembagaan serta memperkuat kesiapan anggota Pokja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Otonomi Khusus Papua. Bagi Pokja Papua Sehat, kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam menyusun program kerja yang lebih terarah, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi, serta mengawal pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada Orang Asli Papua. Saran 1. Sekretariat Badan Pengarah Papua perlu melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh anggota Pokja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal. 2. Perlu diselenggarakan forum koordinasi dan peningkatan kapasitas secara berkala guna memperkuat pemahaman terhadap kebijakan Otonomi Khusus serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi SHEK. 3. Pokja Papua Sehat perlu memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, institusi kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan mitra pembangunan agar pelaksanaan program lebih sinergis dan berbasis kebutuhan masyarakat. 4. Setiap anggota Pokja diharapkan melaksanakan pelaporan kegiatan secara konsisten sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi pelaksanaan program. 5. Hasil pembekalan hendaknya menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Anggota Badan Pengarah Papua. 6. Ketersediaan Anggaran yang cukup untuk anggota pokja dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi anggota pokja
-----------------------------	---	---

Dokumentasi	:	
--------------------	---	--



Kegiatan III. PERTEMUAN TINGKAT TINGGI (HIGH-LEVEL MEETING) PERCEPATAN IMUNISASI, PENGENDALIAN MALARIA, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 2.3 Rincian Kegiatan III Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Juni 2026

KEGIATAN III		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	Hari/Tanggal: Selasa–Rabu, 23–24 Juni 2026 Waktu: Pukul 08.00 WIT – selesai



KEGIATAN III		
Lokasi Kegiatan	:	Swiss-Belhotel Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	PERTEMUAN TINGKAT TINGGI (HIGH-LEVEL MEETING) PERCEPATAN IMUNISASI, PENGENDALIAN MALARIA, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK PROVINSI PAPUA SELATAN
Misi / Keterangan	:	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA SEHAT Papua Sehat: Kegiatan ini merupakan implementasi langsung misi Papua Sehat, dengan fokus pada percepatan cakupan imunisasi dasar lengkap, pengendalian malaria, penurunan angka kematian ibu dan anak, penguatan pelayanan kesehatan primer, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Papua Cerdas: Melalui peningkatan kapasitas para pengambil kebijakan dan penguatan advokasi lintas sektor sehingga pembangunan kesehatan didukung oleh kebijakan yang berbasis bukti, regulasi yang memadai, dan perencanaan yang terintegrasi. Papua Produktif: Melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai modal utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Papua Selatan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Bidang Kesehatan Sinkronisasi: Pokja Papua Sehat mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para mitra pembangunan, agar program imunisasi, pengendalian malaria, serta kesehatan ibu dan anak sejalan dengan RIPPP, RPJMD Provinsi Papua Selatan, dan prioritas pembangunan kesehatan nasional. Harmonisasi: Pokja Papua Sehat berperan dalam mengharmonisasikan berbagai kebijakan, program, dan kepentingan lintas sektor sehingga tercipta kesamaan persepsi mengenai percepatan pembangunan kesehatan. Evaluasi: Pokja Papua Sehat melakukan evaluasi terhadap berbagai tantangan pembangunan kesehatan di Papua Selatan, termasuk rendahnya cakupan imunisasi di beberapa wilayah, tingginya beban malaria, keterbatasan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil, serta perlunya penguatan sistem rujukan ibu dan bayi. Koordinasi: Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, BP3OKP, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan unsur lintas sektor lainnya dalam rangka memperkuat implementasi program Papua Sehat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pelaksana Kegiatan	:	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan UNICEF dan para mitra pembangunan
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan; 2. DPR Papua Selatan dan DPRK Kabupaten Merauke; 3. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan; 4. Anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan; 5. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten se-Papua Selatan; 6. Bapperida Provinsi dan Kabupaten; 7. Rumah sakit, puskesmas, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan; 8. TNI serta organisasi profesi kesehatan (IDI, IBI, PPNI, IDAI);



KEGIATAN III		
		9. Tokoh adat, tokoh agama, TP PKK, dunia usaha, dan akademisi; 10. Mitra pembangunan, antara lain UNICEF, WHO, dan Perdhaki.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membangun komitmen bersama para pengambil kebijakan dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Papua Selatan. 2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. 3. Menyusun strategi percepatan imunisasi, eliminasi malaria, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan. 4. Mendorong dukungan regulasi, penganggaran, dan kebijakan daerah yang mendukung percepatan pembangunan kesehatan. 5. Menyusun rencana tindak lanjut dan membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya Papua Selatan yang sehat dan berkualitas.
Hasil / Output Kegiatan	:	Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Meeting) menghasilkan berbagai kesepakatan strategis dan komitmen lintas sektor dalam rangka mempercepat pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Beberapa hasil penting yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Forum memperoleh gambaran komprehensif mengenai situasi kesehatan di Provinsi Papua Selatan, khususnya terkait cakupan imunisasi dasar lengkap, tingginya beban malaria, serta masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kondisi geografis, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta rendahnya cakupan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan secara terpadu. 2. Disepakati bahwa percepatan pembangunan kesehatan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh sektor kesehatan, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, BP3OKP, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, organisasi profesi, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, media, serta mitra pembangunan. 3. Forum menegaskan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, pengendalian malaria, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, optimalisasi Posyandu, PONEK, PONEK, pelayanan kesehatan bergerak (mobile outreach), serta penguatan sistem rujukan di wilayah terpencil dan perbatasan. Sebagai hasil utama kegiatan, seluruh peserta menyepakati dan menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak Provinsi Papua Selatan yang memuat enam komitmen strategis, yaitu: - Menempatkan kesehatan setiap anak Papua Selatan sebagai prioritas bersama lintas sektor. - Mempercepat pengesahan regulasi penyelenggaraan kesehatan dan penyelenggaraan imunisasi di Provinsi Papua Selatan.



KEGIATAN III

- Mendukung pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10% APBD dengan prioritas pada upaya promotif dan preventif, khususnya di wilayah dengan akses sulit.
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memiliki target, indikator, dan waktu pelaksanaan yang terukur untuk program imunisasi, pengendalian malaria, serta kesehatan ibu dan anak.
- Membentuk dan mengaktifkan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Bapperida sebagai wadah koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
- Mendorong pelibatan tokoh adat, tokoh agama, organisasi profesi, dunia usaha, akademisi, media, serta mitra pembangunan sebagai penggerak masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

Bagi Pokja Papua Sehat BP3OKP, hasil High-Level Meeting menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk mengawal implementasi komitmen lintas sektor tersebut.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut :

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan, Pokja Papua Sehat merekomendasikan:

1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera menindaklanjuti Komitmen Bersama melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat target, indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan secara terukur.
2. Mempercepat penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah mengenai penyelenggaraan kesehatan sebagai dasar penguatan pelayanan kesehatan, imunisasi, pengendalian malaria, serta kesehatan ibu dan anak.
3. Memperkuat pengalokasian anggaran kesehatan yang berorientasi pada pelayanan promotif dan preventif, terutama bagi wilayah terpencil, perbatasan, dan kampung-kampung Orang Asli Papua.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, percepatan eliminasi malaria, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas pembangunan daerah.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembentukan dan pengaktifan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan sebagai wadah monitoring dan evaluasi pelaksanaan komitmen bersama.
6. Mendorong keterlibatan aktif BP3OKP, organisasi profesi, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, media, dan mitra pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Pokja Papua Sehat akan:

1. Mengawal implementasi Komitmen Bersama melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Bapperida, BP3OKP, serta perangkat daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut.

KEGIATAN III

		- Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan program imunisasi, pengendalian malaria, serta kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Papua Sehat. - Menyampaikan rekomendasi hasil High-Level Meeting kepada Anggota Badan Pengarah Papua sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan kebijakan. - Mendorong terselenggaranya forum evaluasi secara berkala untuk menilai capaian pelaksanaan komitmen bersama serta menyusun langkah perbaikan apabila ditemukan kendala di lapangan.
Kesimpulan dan Saran	:	Kesimpulan Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Meeting) menjadi forum strategis dalam memperkuat komitmen lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman bersama mengenai pentingnya peningkatan cakupan imunisasi, percepatan eliminasi malaria, penurunan angka kematian ibu dan anak, penguatan pelayanan kesehatan primer, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Penandatanganan Komitmen Bersama oleh pemerintah daerah, BP3OKP, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Saran - Seluruh pihak yang telah menandatangani Komitmen Bersama diharapkan melaksanakan komitmen tersebut secara konsisten melalui program dan kegiatan yang terukur serta berkelanjutan. - Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu mempercepat pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan sebagai wadah koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen bersama. - Diperlukan penguatan dukungan anggaran, regulasi, dan sumber daya untuk mempercepat peningkatan cakupan imunisasi, eliminasi malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. - Pokja Papua Sehat BP3OKP diharapkan terus melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memastikan setiap komitmen yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara efektif.
Dokumentasi	:	 



Kegiatan IV.KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/WAKIL KEPALA BKKBN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) TAHUN 2026 DAN PENCATATAN SIPIL MASSAL DI KABUPATEN MERAUKE

Tabel 2.4 Rincian Kegiatan IV Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Juni 2026

KEGIATAN IV	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Hari/Tanggal: 26–28 Juni 2026 Puncak Kegiatan: Sabtu, 27 Juni 2026
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	: KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/WAKIL KEPALA BKKBN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) TAHUN 2026 DAN PENCATATAN SIPIL MASSAL DI KABUPATEN MERAUKE
Misi / Keterangan	: BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA SEHAT Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	: SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Bidang Kesehatan Sinkronisasi: Pokja Papua Sehat mengikuti kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi kebijakan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan dengan program prioritas nasional. Harmonisasi: Melakukan harmonisasi antara kebijakan pembangunan keluarga, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan perlindungan hukum bagi keluarga sehingga tercipta pelayanan yang terpadu bagi masyarakat. Evaluasi: Melakukan identifikasi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga, pelayanan KB, kesiapan calon pengantin, serta perlindungan hukum melalui pencatatan sipil. Koordinasi: Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, serta instansi terkait dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Pelaksana Kegiatan	: Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta perangkat daerah terkait
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	: 1. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Republik Indonesia; 2. Gubernur Papua Selatan; 3. Wakil Gubernur Papua Selatan;



KEGIATAN IV

		4. Bupati Merauke beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Merauke; 5. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; 6. BP3OKP Provinsi Papua Selatan; 7. DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, DPRK Merauke, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; 10. Pasangan peserta nikah dan pencatatan sipil massal serta masyarakat Kabupaten Merauke.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan keluarga berkualitas. 2. Memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen kependudukan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, serta pendampingan calon pengantin. 4. Mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan kesiapan calon keluarga melalui Program Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil). 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan keluarga sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hasil / Output Kegiatan	:	Pelaksanaan kunjungan kerja menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dan nikah massal merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. 2. Pemerintah Kabupaten Merauke berhasil melaksanakan pencatatan sipil massal bagi 197 pasangan (394 jiwa) yang berasal dari berbagai denominasi agama. Para peserta menerima Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga baru, KTP elektronik dengan status kawin, serta paket keluarga. 3. Wakil Menteri menyampaikan bahwa pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, sehingga pembangunan harus dimulai dari keluarga yang sehat, harmonis, dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. 4. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 Tahun 2026, disampaikan tema “Ayah Wajib Hadir” sebagai pengingat pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta pembentukan keluarga yang harmonis. 5. Penyerahan Sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) kepada calon pengantin menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesiapan pasangan memasuki kehidupan berkeluarga, mencegah stunting sejak sebelum kehamilan, serta meningkatkan kesehatan reproduksi calon ibu dan ayah. 6. Peninjauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Mopah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan



KEGIATAN IV

	kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, dan pendampingan keluarga. 7. Mengunjungi keluarga prasejahtera untuk memberikan bantuan sosial dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan jamban. 8. Bagi Pokja Papua Sehat, kegiatan ini memberikan penguatan terhadap pentingnya integrasi antara pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pembangunan keluarga, serta perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Selatan. 9. Dalam pelaksanaan kegiatan, mengemukakan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor antara BP3OKP Provinsi Papua Selatan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Selatan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas, edukasi kesehatan keluarga, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga hingga tingkat distrik dan kampung.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi Berdasarkan hasil kegiatan, Pokja Papua Sehat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten serta BP3OKP dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas dan penurunan stunting 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak masa prakonsepsi. 3. Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, dan edukasi calon pengantin hingga ke distrik dan kampung. 4. Mendorong percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk perlindungan hak-hak sipil. 5. Memperkuat edukasi mengenai peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sesuai tema Hari Keluarga Nasional Tahun 2026. Rencana Tindak Lanjut 1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memperkuat program pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, dan percepatan penurunan stunting. 2. Mengawal implementasi pelayanan kesehatan reproduksi dan pendampingan calon pengantin melalui kerja sama lintas sektor. 3. Mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki legalitas perkawinan. 4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Pokja Papua Sehat. 5. Membangun koordinasi dan kolaborasi bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Papua Selatan dan dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, edukasi kesehatan keluarga, serta percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat hingga tingkat kampung.

KEGIATAN IV

Kesimpulan dan Saran	: Kesimpulan Kunjungan kerja Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Republik Indonesia memberikan penguatan terhadap pelaksanaan pembangunan keluarga di Provinsi Papua Selatan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencatatan sipil massal, serta penguatan peran keluarga dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Saran 1. Pemerintah daerah perlu memperluas edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting kepada calon pengantin dan pasangan usia subur. 2. Pelayanan Keluarga Berencana dan pendampingan keluarga perlu terus diperkuat hingga menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat Orang Asli Papua. 3. Koordinasi antara sektor kesehatan, kependudukan, dan administrasi kependudukan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan keluarga berjalan secara terpadu. 4. Pokja Papua Sehat BP3OKP diharapkan terus mengawal implementasi kebijakan pembangunan keluarga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Dokumentasi	:
	

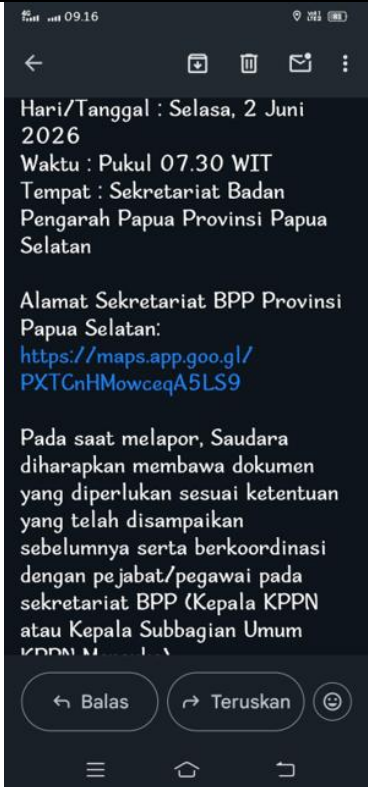
LAPORAN KEGIATAN POKJA PRODUKTIF BULAN JUNI 2026

Undangan Pengarahan sebagai Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif

KEGIATAN 1	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Selasa, 2 Juni 2026 Waktu ; Pukul 08.00 – 12 WIT
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat Kepala BPP Papua Selatan Jl. Prajurit No. 1 Merauke
Judul Kegiatan	Pemberitahuan Kelulusan seleksi dan Mulai Bekerja Sebagai Anggota Pokja di Sekretariat Badan Pengarah
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF

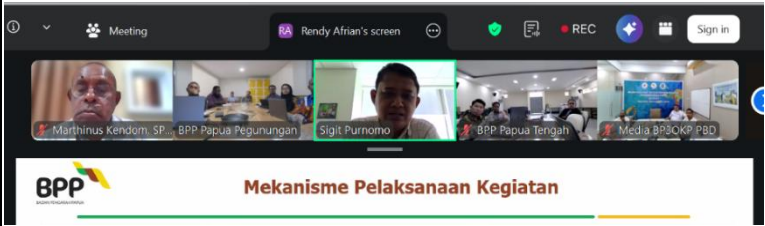


	Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	Koordinasi Bersama Anggota BPP dan Sekretariat BPP Bersama Pokja Cerdas, Pokja Sehat, Pokja Cerdas Terkait SOP Pelaksanaan Kerja

Pelaksana Kegiatan	BPP Provinsi Papua Selatan.
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif (Marthinus Kendom)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Memberikan Pengarahan kepada Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif
Hasil / Output Kegiatan	Adaptasi lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi Pokja Papua Produktif.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Arahan, Petunjuk dan Koordinasi dari Anggota BPP dan Anggota Pokja BPP PPS
Dokumentasi	

KEGIATAN 2	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Kamis, 11 Juni 2026 Waktu ; Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat Kepala BPP Papua Selatan Jl. Prajurit No. 1 Merauke



Judul Kegiatan	Pengarahan sebagai Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif secara Online oleh Kanwil Kementerian Keuangan Jayapura
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	Melaksanakan Koordinasi bersama sekretariat jayapura mengenai Hak dan Kewajiban Anggota BPP
Pelaksana Kegiatan	Sekretariat BPP Jayapura
Peserta kegiatan/ Sumber Dokumen	Anggota BPP, Sekretariat BPP Bersama Pokja Cerdas, Pokja Sehat, Pokja Produktif
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Mengikuti kegiatan pengarahan dari Sekretariat Badan Pengarah Papua dari Jayapura 2. Memberikan pemahaman tentang Hak dan kewajiban sebagai Anggota Pokja BPP
Hasil dan Output Kegiatan	• Peningkatan Pemahaman Mekanisme Kerja Kebijakan: Terwujudnya pemahaman yang komprehensif bagi seluruh peserta setelah mengikuti pengarahan langsung dari Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) Jayapura terkait arah kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi program percepatan pembangunan di Papua. • Kejelasan Hak dan Kewajiban Anggota: Anggota Pokja BPP kini memiliki persepsi yang sama serta kejelasan yang mutlak mengenai hak, tanggung jawab, dan kewajiban konstitusional mereka. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Berkolaborasi dan membangun bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan peran dari masing-masing Pokja BPP PPS.
Dokumentasi	



KEGIATAN 3	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Kamis, 4 Juni 2026 Waktu ; 09.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	Hotel Halogen, Jalan Brawijaya Merauke
Judul Kegiatan	<i>Sosialisasi Grand Riset Badan Pengelola Dana Perekbunan (BPDP)</i>
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Bidang Produktif Sinkronisasi: Pokja Produktif mengikuti kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sinkronisasi Grand Riset Badan Pengelola Dana Perekbunan (BPDP) Harmonisasi: Melakukan harmonisasi antara Lembaga Akademik, LPDP, dan Pokja Papua Produktif Evaluasi: Dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut keikutsertaan dosen dalam menyampaikan proposal penelitian Koordinasi: pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari Pelaksanaan Fungsi Koordinasi yaitu mendorong Partisipasi dosen dalam memanfaatkan dana penelitian.
Pelaksana Kegiatan	Universitas Musamus
Peserta kegiatan/ Sumber Dokumen	Peserta kegiatan terdiri dari: 1. Civitas Akademik Universitas Musamus Merauke 2. Pemerintah Kabupaten Merauke 3. BAPPERIDA Kabupaten Merauke 4. Pemerintah Provinsi Papua Selatan 5. BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Sosialisasi Grand Riset Badan Pengelola Dana Perekbunan (BPDP) 2. Penerimaan Proposal Penelitian Kelapa Sawit, Kelapa dan Kakao 3. Prospek peningkatan Tata Kelola Produksi Kelapa sawit dengan penerapan teknologi produksi dan pasca panen.

Hasil dan Output Kegiatan	Hasil Kegiatan Papua Produktif - Mendorong peran serta akademisi local dalam memanfaatkan dana penelitian dengan mengajukan proposal penelitian yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. - Mendorong memenuhi kewajiban pengelolaan hubungan Inti dan Plasma yang dikelola oleh Koperasi
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi Memenuhi waktu pengumpulan Proposal Penelitian sesuai ketapan waktu Rencana Tindak Lanjut Proses verifikasi dan penilaian oleh Panitia secara Nasional.
Dokumentasi	

KEGIATAN 4	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Selasa, 09 Juni 2026 Waktu ; 08.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	Hotel Halogen, Jalan Brawijaya Merauke
Judul Kegiatan	Ruang Rapat Gubernur Lt. 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Salor, Distrik Kurik, Kab. Merauke
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	1. Penguatan peran dan tugas pokok fungsi Anggota DPRK mekanisme Pengangkatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Penguatan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus, terkait Proses Pelaksanaan Kewenangan dan Kelembagaan Khusus, Perumusan Dokumen Perencanaan, dan Penguatan Tata Kelola Keuangan; 3. Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan paket kebijakan Otonomi Khusus; 4. Mendorong komitmen dan langkah konkret kementerian/lembaga dan anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan dalam menyukseskan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; 5. Memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi antara level kebijakan dan implementasi di lapangan guna menghasilkan harmonisasi pembangunan dan akselerasi percepatan kesejahteraan khususnya pada Kabupaten-Kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua Selatan.
Pelaksana Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Peserta kegiatan/ Sumber Dokumen	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRK 4 Kabupaten Se Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK mekanisme pengangkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus Papua khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
Hasil dan Output Kegiatan	1. Penyampaian materi tentang penguatan kapasitas dan kinerja DPRK terkait dengan UU dan Peraturan pelaksanaan OTSUS Papua. 2. Sinkronisasi pemahaman bersama DPRK dan Pemerintah tentang tugas, fungsi dan peran BP3OKP/BPP dalam pelaksanaan OTSUS Papua. 3. Keselarasan pemahaman tentang proses dan mekanisme tata kelola OTSUS
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Berkolaborasi dan bersinergi bersama DPRK, Pemerintah dan kementerian terkait dalam pelaksanaan OTSUS Papua Melakukan penguatan dan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan OTSUS Papua
Dokumentasi	



KEGIATAN 5	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Selasa, 09 Juni 2026 Waktu ; 08.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	Hotel Halogen, Jalan Brawijaya Merauke
Judul Kegiatan	Ruang Rapat Gubernur Lt. 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Salor, Distrik Kurik, Kab. Merauke
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	SHEK Narasumber Materi a) Pemanfaatan Anggaran yang akuntabel, terdiri atas Dana Otsus, DBH Migas, dan DTI, b) Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025- 2029 (RAPPP),c) Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 33 Tahun 2024, d) Pelaksanaan Kewenangan dan Kelembagaan Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, e) Penguatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pengarah Papua (BP3OKP/BPP), serta f) pengawasan tata kelola implementasi dana otonomi khusus
Pelaksana Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Peserta kegiatan/ Sumber Dokumen	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRK 4 Kabupaten Se Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK mekanisme pengangkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus Papua khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus



	sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
Hasil dan Output Kegiatan	4. Penyampaian materi tentang penguatan kapasitas dan kinerja DPRK terkait dengan UU dan Peraturan pelaksanaan OTSUS Papua. 5. Sinkronisasi pemahaman bersama DPRK dan Pemerintah tentang tugas, fungsi dan peran BP3OKP/BPP dalam pelaksanaan OTSUS Papua. 6. Keselarasan pemahaman tentang proses dan mekanisme tata kelola OTSUS
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Berkolaborasi dan bersinergi bersama DPRK, Pemerintah dan kementerian terkait dalam pelaksanaan OTSUS Papua Melakukan penguatan dan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan OTSUS Papua
Dokumentasi	

KEGIATAN 6



Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/ Tanggal ; Senin – Rabu, 22 – 24 Juni 2026
Lokasi Kegiatan	Hotel swisBell Ruko Pasifik Permai Jayapura
Judul Kegiatan	Pengukuhan Anggota Pokja Cerdas, Pokja Sehat, Pokja Produktif
Misi/ Keterangan	BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN / POKJA PAPUA PRODUKTIF Papua Sehat: Kegiatan ini mendukung misi Papua Sehat melalui penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesiapan calon pengantin, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Papua Cerdas: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai investasi sumber daya manusia. Papua Produktif: Mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, memiliki kepastian hukum, serta mampu menghasilkan generasi yang produktif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Kegiatan	Badan Pengarah Papua Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Peserta kegiatan/ Sumber Dokumen	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRK 4 Kabupaten Se Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam rangka pengukuhan dan sekaligus memberikan pembekalan materi terkait tugas, fungsi dan tanggung jawab Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua, maka diselenggarakan Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Anggota Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026 pada hari Senin s.d. Rabu, 22 s.d.24 Juni 2026 berlokasi di di Jayapura, sebagaimana rundown tersebut diatas.
Hasil dan Output Kegiatan	1. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi Pokja Badan Pengarah Papua. 2. Terbangunnya kesamaan persepsi antara Anggota BPP, Sekretariat BPP dan Pokja dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 3. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai arah kebijakan RIPP dan RAPP sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan Papua. 4. Peserta memperoleh pemahaman mengenai tata kelola Dana Otonomi Khusus yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 5. Terbangunnya komitmen kerja melalui penandatanganan Pakta Integritas.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	1. Pelaksanaan Tugas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Berkolaborasi dan bekerjasama dengan Pemerintah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua, khususnya Papua Selatan

Dokumentasi

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Juni 2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan

fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) oleh Anggota BP3OKP dan Pokja Cerdas, Pokja Papua Sehat, Pokja Produktif bersama pemerintah pusat terkait telah berjalan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus. Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan utama adalah:

- Untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Selatan, diperlukan penguatan koordinasi dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan (BP3OKP, Sekretariat, dan Pokja) dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus secara transparan dan akuntabel. Langkah strategis ini fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui riset daerah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekosistem pendidikan (termasuk kolaborasi lintas sektor/industri dan penyelesaian kendala infrastruktur seperti Sekolah Rakyat Terintegrasi 77) guna melahirkan figur teladan yang berdaya saing tinggi. Maka dinilai Perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, tata kelola yang transparan, dan akuntabel dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus; di mana setiap program pendidikan dan pengembangan SDM Papua Cerdas harus disusun berbasis data riil masyarakat yang terukur guna memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas, daya saing, serta kesejahteraan Orang Asli Papua secara berkelanjutan.



- Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama Bulan Juni Tahun 2026 menunjukkan terlaksananya fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan. Empat kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan berbagai informasi strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian selama Bulan Juni meliputi optimalisasi tata kelola Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan, penguatan kapasitas kelembagaan Pokja, percepatan imunisasi, pengendalian malaria, penurunan angka kematian ibu dan anak, pembangunan keluarga berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, serta perlunya penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua. Pelaksanaan kegiatan juga memperkuat kemitraan antara BP3OKP dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, BKKBN, Tim Penggerak PKK, organisasi profesi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan

3.3 . Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Juni 2026. Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama seluruh pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan koordinasi.
- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”



Merauke, 07 Juli 2026
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd . M.Si .M RSC

NIP: 999920240117145257